

**PERUBAHAN IKLIM MERUPAKAN ANCAMAN YANG LEBIH BESAR
DIBANDINGKAN KETIDAKSTABILAN POLITIK DI AFRIKA BARAT
(Studi Kasus Guinea, Mali, Dan Burkina Faso)**

Raihanah Dinda Alyfia Rahman^{1*}, Azzahratul Khalillah Hasni²,

Adam Maulana Wijaya³, Alwan Maulana Wijaya⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

* raidafia1273@gmail.com

Abstract

This research addresses the issue of climate change as a greater threat than political instability in West Africa with a focus on the countries of Guinea, Burkina Faso and Mali. The main issue discussed is the significant impact of climate change in the region, including risks to livelihoods, cultural identity, and increased migration. The purpose of this research is to emphasize the urgency of addressing climate change rather than political instability in West Africa. The methodology used is a descriptive qualitative approach, using relevant secondary data to explain the profound impacts of climate change in the region. The data used included climate projections, historical climate data, and information on political instability in the form of coups in West Africa. Findings show that climate change is a significant threat to the region, as well as a "threat multiplier" exacerbating existing political instability and putting additional pressure on limited resources. The conclusion is that climate change has far-reaching and complex impacts, economically, socially and politically. As such, climate change is more threatening than political instability in West Africa.

Keywords : climate change, political instability, threat, West Africa.

Abstrak

Penelitian ini membahas masalah perubahan iklim sebagai ancaman yang lebih besar daripada ketidakstabilan politik di Afrika Barat dengan fokus pada negara Guinea, Burkina Faso, dan Mali. Masalah utama yang dibahas adalah dampak signifikan dari perubahan iklim di wilayah tersebut, termasuk risiko terhadap mata pencaharian, identitas budaya, dan peningkatan migrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menekankan urgensi penanganan perubahan iklim daripada ketidakstabilan politik di Afrika Barat. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan data sekunder yang relevan untuk menjelaskan dampak mendalam dari perubahan iklim di wilayah tersebut. Data yang digunakan meliputi proyeksi iklim, data iklim historis, dan informasi mengenai ketidakstabilan politik dalam bentuk kudeta di Afrika Barat. Temuan menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman yang signifikan bagi kawasan ini, juga sebagai "pengganda ancaman" memperburuk ketidakstabilan politik yang sudah ada dan memberikan tekanan tambahan pada sumber daya yang terbatas. Kesimpulan yang

dapat diambil adalah menunjukkan bahwa perubahan iklim memiliki dampak yang luas dan kompleks, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan hal tersebut maka perubahan iklim merupakan sesuatu yang sangat mengancam ketimbang ketidakstabilan politik di Afrika Barat.

Kata kunci : Afrika Barat, ancaman, ketidakstabilan politik, perubahan iklim.

PENDAHULUAN

Afrika Barat telah menjadi saksi bisu dari lebih dari 200 kudeta dan upaya kudeta. Hal ini menunjukkan adanya tingkat ketidakstabilan politik yang tinggi di kawasan ini. Bahkan, seorang peneliti menyatakan bahwa Afrika Barat menjadi kawasan dengan jumlah kudeta tertinggi di benua Afrika, yang mencapai 44,4% (Onapajo, H., 2022). Terdapat faktor internal dan eksternal yang membuat negara-negara ini mengalami ketidakstabilan politik, terkhusus kudeta yang sering terjadi di negara-negara Afrika Barat. faktor internal yaitu defisit tata kelola pemerintahan, yang menimbulkan protes dari masyarakatnya, seperti gerakan separatis untuk menggulingkan pemerintahan. Faktor eksternalnya adalah pengaruh asing dari negara yang pernah menjajah atau negara yang mencari pengaruh dan keuntungan strategis di Afrika. Seperti Rusia yang terlibat dalam kudeta pada tahun 2020 dan 2021 di Mali, serta Burkina Faso. Kudeta di Mali juga dikatakan terjadi akibat campur tangan dalam bentuk pelatihan dan bantuan dari AS.

Menurut data dari United Nations, yang selanjutnya akan disingkat sebagai PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), kawasan lintas-perbatasan Burkina Faso, Mali, dan Guinea diperkirakan akan terus mengalami eskalasi krisis kemanusiaan yang signifikan akibat konflik internal yang berkepanjangan ini. PBB memperingatkan bahwa wilayah perbatasan tersebut akan menjadi titik panas krisis kemanusiaan dalam beberapa tahun ke depan. Konflik internal yang semakin intensif di kawasan ini telah menyebabkan penderitaan yang luas bagi masyarakat sipil dan mengancam stabilitas regional (Tim detik.com., 2023). Situasi ini semakin diperparah oleh dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem. Bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang semakin sering terjadi di kawasan ini jelas memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah rapuh akibat konflik politik. Situasi ini telah memaksa jutaan orang mengungsi dari rumah mereka dan membutuhkan bantuan kemanusiaan yang mendesak. Interaksi antara konflik dan perubahan iklim membuat negara-negara di wilayah Afrika Barat mengalami apa yang disebut sebagai 'lingkaran setan' (Islam Today., 2022). Guinea, Mali, dan Burkina Faso mengalami 'kudeta dalam kudeta' yang sangat tersorot pada tahun 2020, 2021, dan 2023, sehingga mengakibatkan,

lebih dari 10 juta jiwa memerlukan bantuan kemanusiaan dan perlindungan, baik dari ketidakstabilan politik, maupun dari krisis perubahan iklim.

Mengutip dari PBB kembali, Perubahan iklim terjadi akibat perubahan suhu dan pola cuaca jangka panjang. Dimana perubahan iklim ini memberikan dampak yang serius seperti Hotter temperatures; Destructive storms; Increased drought; Loss of species; Rise in hunger and poor nutrition; Health threat facing humanity; and Poverty-displacement (United nations., 2023). Dan dari laporan yang diterima oleh PBB, tertulis bahwa “Climate change is having a growing impact on the African continent, hitting the most vulnerable hardest, and contributing to food insecurity, population displacement and stress on water resources.” (UNFCC., 2023). Sehingga kawasan ini telah diprediksi akan mengalami dampak yang signifikan dari perubahan iklim. Ironisnya, dari laporan PBB, percepatan perubahan iklim disebabkan oleh emisi oleh tujuh negara, yaitu Cina, Amerika Serikat, India, Uni Eropa, Indonesia, Rusia, dan Brazil, yang menyumbang setengah dari total emisi gas rumah kaca global (United Nations., 2023).

“Africa will be hardest hit by climate change, but has contributed the least to causing that change.” (Koestatnto, R. B. D., 2022). Paradoks ‘Setiap bagian dunia akan mempengaruhi bagian dunia lainnya’, terlihat jelas dalam kasus Afrika. Bukti bahwa benua Afrika adalah kawasan dengan penyumbang emisi kecil, tetapi menjadi kawasan yang sangat dan rentan terhadap dampak dari perubahan iklim menunjukkan keadilan iklim benar-benar terabaikan di Afrika, karena benua ini, yang hampir tidak berkontribusi pada krisis iklim, justru menanggung beban yang paling berat dikarenakan ketergantungan yang tinggi pada pertanian subsisten, dikombinasikan dengan sistem iklim yang kompleks dan tidak dapat diprediksi, membuat benua menjadi sangat rentan terhadap perubahan pola cuaca ekstrem seperti kekeringan dan banjir. Selain itu, kapasitas adaptasi yang rendah di banyak negara Afrika memperparah situasi, yang kemudian menyebabkan kegagalan panen, kekurangan pangan, dan migrasi dalam skala besar (BBC News., 2019).

Lingkaran setan ketidakstabilan politik dan perubahan iklim di Afrika telah menimbulkan krisis kemanusiaan yang serius. Uni Afrika telah mengambil langkah tegas dalam menghadapi tantangan keamanan dan politik di benua Afrika. Melalui KTT 2022, organisasi ini berusaha menyatukan langkah negara-negara anggota dalam mengatasi masalah kudeta dan dampaknya terhadap kemanusiaan, terutama di tengah krisis iklim yang semakin parah. Sejak pertengahan 2021, Dewan Perdamaian dan Keamanan Uni Afrika

telah memberlakukan sanksi penangguhan keanggotaan terhadap negara-negara yang melanggar prinsip demokrasi, seperti yang terlihat dalam keputusan untuk menanggukkan Guinea, Mali, dan Burkina Faso, akibat kudeta yang terjadi di negara-negara tersebut (Koestatnto, R. B. D., 2022).

Mengingat tingginya frekuensi kudeta di Afrika Barat, yang ditandai oleh ketidakstabilan politik di negara-negara seperti Guinea, Mali, dan Burkina Faso serta ancaman krisis iklim yang semakin nyata penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis bahwa perubahan iklim merupakan ancaman yang lebih serius dan berkelanjutan bagi kawasan ini. Dengan mengambil kasus Guinea, Mali, dan Burkina Faso, penelitian ini akan menganalisis bagaimana perubahan iklim dapat menjadi ancaman yang lebih signifikan dibandingkan ketidakstabilan politik di ketiga negara tersebut, serta mengapa perubahan iklim dianggap lebih berbahaya daripada kudeta yang sering terjadi di wilayah ini.

KAJIAN TEORITIS

Literatur pertama dari artikel jurnal karya Emrah Sofuoglu dan Ahmet Ay yang berjudul “The relationship between climate change and political instability: the case of MENA countries (1985:01–2016:12)” memuat hubungan kausalitas antara perubahan iklim dengan ketidakstabilan politik dengan data dari 16 negara di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) dari tahun 1985 hingga 2016. Korelasi dan atau kausalitas antara perubahan iklim dan ketidakstabilan politik ini dikaji menggunakan analisis empiris untuk memperkuat reliabilitas dan konsistensi hasil. Hubungan antara variabel perubahan iklim dan ketidakstabilan politik diuji secara terpisah, dan temuan tersebut diinterpretasikan sebagai hubungan yang kuat atau lemah. Hasil dari penelitian artikel ini menyatakan bahwa perubahan iklim dapat dikutip sebagai alasan untuk menjelaskan ketidakstabilan politik di kawasan MENA (Sofuoglo, E et al., 2016).

Artikel ini menyimpulkan bahwa negara-negara di kawasan MENA, mengalami masalah sosial ekonomi sehingga terjadi ketidakstabilan politik yang salah satunya disebabkan oleh perubahan iklim. Kesimpulan ini dikarenakan, negara-negara yang terkena dampak besar dari perubahan iklim adalah negara-negara miskin. “Economic and political problems directly lead to political instability, but one of the most important factors indirectly causing political instability is climate change.” Perubahan iklim dikatakan sebagai ancaman ganda terhadap negara-negara tersebut, karena semakin

menambah dan memberikan lebih banyak tekanan kepada sumber daya mereka yang terbatas dan memperkuat ancaman yang sudah ada sebelumnya, yaitu, kemiskinan, pengangguran, dan ketidakstabilan politik. Singkatnya, artikel ini dengan jelas memberikan data dan penyimpulan bahwa perubahan iklim dapat menjadi ancaman yang jelas, terkhusus pada negara yang sudah mengalami ketidakstabilan politik, dan membuat perubahan iklim menjadi “threat multiper”. Meskipun tidak menemukan kausalitas konkrit antara perubahan iklim yang dapat secara langsung menyebabkan ketidakstabilan politik, tetapi dikemukakan bahwa adanya interaksi antara kedua indikator tersebut.

Literatur kedua berupa artikel jurnal karya Mouhamadou Bamba Sylla, Pinghouinde Michel Nikiema, Peter Gibba, Ibourahima Kebe dan Nana Ama Browne Klutse, yang berjudul "Climate Change over West Africa: Recent Trends and Future Projections" yang mengemukakan bahwa Afrika Barat menjadi salah satu wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, dengan peningkatan suhu yang diproyeksikan lebih tinggi dari rata-rata global. Hasil penelitian artikel ini membahas dampak dari perubahan iklim di Afrika Barat, termasuk perubahan frekuensi kekeringan dan respons hidrologi dengan menyoroti potensi dampak perubahan iklim terhadap sumber daya air, pertanian, dan kesehatan manusia di wilayah tersebut (Sylla, M, B et al., 2016).

Dalam literatur kedua ini kembali diperkuat bahwa “West Africa is already facing the consequences of climate change.” Wilayah tersebut telah mengalami pemanasan dalam beberapa dekade terakhir sebagai tanggapan terhadap peningkatan gas rumah kaca antropogenik. artikel ini memproyeksikan penelitian-penelitian dan proyek di kawasan Afrika Barat untuk mendapatkan laporan data yang jelas, dan melakukan pengukuran dampak dari perubahan iklim di kawasan tersebut. Beberapa program, seperti Pusat Layanan Sains Afrika Barat tentang Perubahan Iklim dan Penggunaan Lahan yang Diadaptasi (WASCAL), telah muncul dalam beberapa tahun terakhir dengan memperkuat layanan iklim di Afrika Barat melalui kerja sama dengan badan meteorologi nasional, pemantauan iklim, dan pengumpulan data untuk eksperimen perubahan iklim yang lebih terkoordinasi.

Literatur ketiga berupa jurnal artikel Jurnal karya Antony Otieno Ong’ayo, yang berjudul "Political Instability in Africa: Where the Problem Lies and Alternative Perspectives", yang mengemukakan bahwa akar penyebab dari adanya ketidakstabilan

politik di Afrika ini sangat beragam dan kompleks, termasuk faktor-faktor seperti keterbelakangan ekonomi, korupsi, ketegangan etnis dan agama, dan campur tangan pihak-pihak asing (eksternal). Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan peningkatan stabilitas politik di Afrika (Ongayo, A., 2008). Namun, persepsi negatif tentang Afrika dan kepemimpinannya dalam menghadapi krisis pembangunan memperumit upaya penstabilan politik. Banyak negara di Afrika masih terpengaruh oleh warisan kolonial yang menciptakan pemerintahan dan lembaga negara yang lemah, sistem legislatif yang cacat, serta perjuangan terus-menerus dari gerakan pro-demokrasi untuk mencapai kekuasaan politik yang diinginkan.

Perbedaan utama penelitian ini dengan literatur sebelumnya adalah meskipun ketidakstabilan politik merupakan masalah serius di Afrika Barat, penelitian ini berargumen bahwa perubahan iklim merupakan ancaman yang lebih mendasar dan kompleks. Dengan mengspesifikasikan data dari Guinea, Mali, dan Burkina Faso, penelitian ini akan menunjukkan bahwa perubahan iklim tidak hanya memperburuk situasi politik, tetapi juga menciptakan tantangan baru yang sulit diatasi oleh negara-negara di kawasan ini. Perubahan iklim membawa dampak langsung yang berpotensi lebih merusak dibandingkan ketidakstabilan politik. Dan ketidakstabilan politik ini harus segera diatasi, karena permasalahan perubahan iklim akan menjadi ancaman yang lebih besar dan semakin sulit untuk diatasi oleh negara-negara yang pemerintahan dan politiknya tidak stabil ini.

Dengan merujuk pada literatur sebelumnya, studi ini bertujuan untuk melengkapi pemahaman dan membantu memperkuat serta memverifikasi data dari berbagai sumber terkait tentang dinamika kompleks yang terjadi di Afrika Barat. Dengan demikian, penelitian ini menekankan bahwa perubahan iklim dapat menjadi ancaman yang lebih besar bagi Afrika Barat dibandingkan dengan ketidakstabilan politik. Hal ini melengkapi temuan dari literatur terdahulu, yang menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik telah lama menjadi pola yang merugikan negara-negara di Afrika. Serta menekankan perlunya tindakan segera untuk mengatasi perubahan iklim, mengingat dampaknya yang luas dan kompleks terhadap kehidupan masyarakat di Afrika Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis dampak perubahan iklim di Afrika, dengan fokus pada negara-negara seperti Guinea, Mali, dan Burkina Faso. Pemilihan Afrika sebagai objek kajian didasarkan pada fakta bahwa benua ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dengan menggunakan data sekunder yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman yang lebih signifikan dibandingkan ketidakstabilan politik di kawasan tersebut. Analisis deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan dampak-dampak perubahan iklim yang paling krusial untuk menunjukkan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman yang lebih signifikan dibandingkan ketidakstabilan politik di kawasan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dan strategi adaptasi yang lebih efektif untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Afrika.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan suhu sebagai dampak dari perubahan iklim turut meningkatkan frekuensi dan intensitas kekeringan di kawasan Afrika Barat. Wilayah di Afrika Barat ini sedang mengalami pertumbuhan populasi eksponensial dan harus menghadapi konsekuensi perubahan iklim melalui degradasi lahan bertahap dan hilangnya lahan pertanian dan layanan ekosistem, tekanan dan kelangkaan air yang tinggi, bersamaan dengan kekeringan berulang serta banjir bandang. Kondisi inilah, yang diperkirakan akan semakin parah di masa depan. Ancaman yang signifikan terhadap sumber daya air, kegiatan pertanian, dan jasa ekosistem. Data ini merujuk pada laporan dari Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) in Assessment Report 5 (AR5) yang yang memperkirakan dampak dari perubahan iklim di kawasan Afrika Barat ini akan semakin parah di masa mendatang, berupa ancaman yang signifikan terhadap sumber daya air, kegiatan pertanian, dan jasa ekosistem (Sylla, M, B et al., 2016). dengan meninjau temuan dari laporan IPCC dan pengamatan oleh Coordinated Regional climate Downscaling Experiments (CORDEX) mendapatkan hasil bahwa dalam beberapa dekade terakhir terjadi kenaikan suhu di kawasan tersebut antara 0,3 dan 1°C, meski di Mali dan Burkina Faso tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Dan curah hujan di Afrika Barat untuk periode mulai dari 1983 hingga sekarang terus meningkat secara signifikan sekitar 0,2–1,0 mm/hari per dekade, dan

secara statistik mengalami peningkatan sebesar 90% di Burkina Faso dan Mali. Sedangkan di Guinea, Teluk Guinea mengalami kondisi yang lebih kering dalam beberapa tahun terakhir (Sylla, M, B et al., 2016).

Perubahan iklim yang diproyeksikan dari eksperimen CORDEX multimodel memberikan paparan bahwa suhu di Afrika Barat akan terus meningkat sekitar 1,5–6,5 °C di masa mendatang. Dan menunjukkan perubahan curah hujan di masa depan dapat berkisar antara –30 dan 30%. Burkina Faso dan Mali menjadi negara yang akan mengalami peningkatan dengan intensitas sedang, sekitar 20% sehingga membuat musim kering yang akan lebih lama dengan curah hujan yang akan lebih intens (Sylla, M, B et al., 2016). Untuk kedua periode waktu mendatang (2036–2065 dan 2071–2100), di beberapa wilayah tidak terjadi perubahan yang signifikan, penurunan panjang musim kemarau dan intensitas curah hujan ekstrim dapat turun hingga sebesar 5–10% jika proyek-proyek yang dibuat untuk meminimalkan dampak dari perubahan iklim ini dapat berjalan secara efektif. Tetapi, disebutkan bahwa beberapa peningkatan curah hujan (5–10%) ini terjadi pada tingkatan rendah di Mali dan Guinea (Sylla, M, B et al., 2016). Perubahan iklim yang pasti akan menimpa Guinea, Burkina Faso, dan Mali adalah pemanasan dan atau curah hujan ekstrem di Afrika Barat berkisar antara 1,5 hingga 6,5%. Dampak dari perubahan iklim ini beresilasi, menyebabkan perhitungan yang kurang jelas, antara -10 - 10% untuk masing-masing negara. Meskipun penting untuk dapat laporan dan data yang konkrit untuk dapat memahami dan memprediksi dampak-dampak lainnya dari perubahan iklim yang terjadi, terkhusus di kawasan Guinea, Burkina Faso, dan Mali, tetapi aktivitas manusia dan regulasi pemerintah juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dari cepatnya perubahan iklim yang terjadi di kawasan tersebut (Sylla, M, B et al., 2016).

Menurut data dari artikel “Climate Change and Violent Conflict in West Africa: Assessing The Evidence” yang menyajikan temuan tinjauan literatur beberapa negara di kawasan Afrika Barat, seperti Benin, Burkina Faso, Cabo, Verde, Chad, Pantai Gading, Gambia, Ghana, Guinea, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone dan Togo. Suhu disana diperkirakan akan meningkat 3–6°C di atas level akhir abad ke-20 serta dampak dari emisi karbon, gas rumah kaca, dan sebagainya akan meningkat dari keadaan menengah menjadi terburuk (Tarif, K., 2022). Peningkatan suhu yang akan menaikkan intensitas terjadinya kekeringan, curah hujan ekstrem yang menyebabkan presipitasi, naiknya permukaan air laut, serta banjir yang diperkirakan akan terjadi pada

akhir 2030-an dan awal 2040-an ini (Tarif, K., 2022). Namun, dampak-dampak tersebut sudah mulai terasa saat ini di Afrika Barat. Data dari artikel tersebut memang tidak memberikan data yang spesifik dari perubahan iklim terhadap keadaan lingkungan atau alam, artikel tersebut menjelaskan adanya efek secara langsung dari perubahan iklim yang berinteraksi dengan kerentanan sosial, ekonomi, dan politik di negara terdampak perubahan iklim tersebut.

Perubahan iklim di Afrika Barat telah memicu krisis multidimensional yang mengancam kehidupan masyarakat. Dampaknya meluas dari sektor pertanian dan ekonomi hingga keamanan dan stabilitas. Di beberapa wilayah Afrika Barat, perubahan iklim juga mengancam keamanan melalui konflik bersenjata yang menghambat kapasitas lokal dan nasional. Sehingga dikatakan bahwa perubahan iklim ini telah meningkatkan beban domestik bagi perempuan dan anak-anak, memperlebar kesenjangan gender dalam pendidikan, mobilitas, akses keuangan, dan penghidupan rumah tangga, kelompok rentan, seperti migran, juga sangat terancam oleh perubahan iklim degradasi lingkungan, dan konflik kekerasan yang dengan sangat jelas memperburuk kondisi kehidupan masyarakat (Tarif, K., 2022).

Wilayah di Afrika Barat, identik dengan ketidakstabilan politiknya, sehingga percobaan kudeta maupun kudeta sudah sangat sering terjadi disana. Pada tahun 2021, empat kudeta (berhasil) terjadi di Guinea dan Mali, ini menjadi kudeta terbanyak dalam satu tahun, dimana hal yang sama pernah terjadi pada tahun 1991. Pada tahun 2022, kudeta (berhasil) terjadi di Burkina Faso, dan percobaan kudeta di Guinea (Schultes, I., 2022). Dari temuan yang meninjau selama dekade 2010-2019 di Guinea, Burkina Faso, dan Mali memaparkan bahwa adanya pola umum dan tanda-tanda peringatan dini akan ketidakstabilan kondisi pemerintahan di negara-negara tersebut. Pengertian Kudeta dalam artikel “Western Africa’s Recent Coups”, Kudeta merupakan upaya paksa untuk menggulingkan pemerintah yang sah, dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di dalam atau di luar pemerintahan. Agar dianggap berhasil, para pelaku kudeta harus mampu menguasai kekuasaan selama setidaknya seminggu (Schultes, I., 2022).

Guinea, Burkina Faso, dan Mali menjadi negara yang paling menonjol mengenai umumnya kudeta yang terjadi disana dalam 15 tahun terakhir, dan menjadi negara yang paling banyak menggulingkan Presidennya karena kudeta (Schultes, I., 2022). Data dari Ibrahim Index of African Governance (IIAG) yang menggali kesamaan antara jalur tata

kelola negara dan menyoroti tanda-tanda peringatan menunjukkan ketiga negara, yaitu Guinea, Burkina Faso, dan Mali mengalami perbedaan tingkatan terkait tata kelola negaranya. Pemerintahan Mali pada tahun 2019 mendapatkan skor yang lebih rendah dari tahun 2010, dimana penurunan tersebut terjadi lebih cepat di tahun 2015. Pemerintahan Guinea mengalami peningkatan skor di tahun 2010, dan peningkatan skor tersebut semakin cepat semenjak tahun 2015. Sedangkan pemerintahan di Burkina Faso, mendapatkan skor yang lebih tinggi pada tahun 2010 dibanding kedua negara tadi, tetapi skor keseluruhan di tahun 2019 mengalami penurunan, dimana penurunan tersebut terjadi lebih cepat di tahun 2015 (Schultes, I., 2022). Skor ini berisiko akan membalikkan kemajuan yang telah dibentuk selama dekade terakhir, tetapi dari banyaknya hasil penurunan skor yang dialami ketiga negara, terbukti di tahun 2020-2022, banyaknya percobaan kudeta dan kudeta yang berhasil terjadi di tiga negara tersebut.

Data yang telah dikumpulkan, melaporkan di Guinea, semenjak tahun 2008-2021, selalu terjadi percobaan kudeta atau konflik yang diakibatkan ketidakstabilan politik pemerintahan di negaranya. Pada Desember 2008, Setelah kematian Presiden Lansana Conte, militer mengambil alih pemerintahan (kudeta). Desember 2009, Presiden sementara terbunuh, dan digantikan lagi oleh presiden sementara lainnya. Di tahun 2010, diadakan pemilihan presiden, dan Alpha Conde terpilih menjadi presiden, di Juli, 2011 terjadi upaya pembunuhan (upaya kudeta) terhadap Presiden Alpha Conde. Hingga pada Oktober, 2015, Pemilihan presiden, memilih Presiden Alpha Conde kembali. Maret, 2020, Terjadi referendum konstitusional yang membuat Presiden Alpha Conde ini dapat terpilih dan menjabat lagi menjadi Presiden ketiga kalinya. September, 2021, Presiden Alpha Conde ini di kudeta oleh militer dan kemudian digantikan dengan oleh Mamady Doumbouy sebagai presiden sementara (Schultes, I., 2022).

Percobaan kudeta atau konflik yang diakibatkan ketidakstabilan politik pemerintahan di Burkina Faso, terhitung dari tahun 2014-2022. Oktober, 2014, terdapat protes massa (demo) yang membuat militer mengambil alih pemerintahan Presiden Blaise Compaore, dan digantikan oleh Presiden sementara, Michel Kafando. Di September 2015, Kelompok dari presiden sebelumnya yang tidak terima, melakukan upaya kudeta sebagai aksi kontra-nya terhadap pemerintahan sementara yang sekarang. Dan pada Desember 2015, terjadi pemilihan presiden baru, dengan Roch Marc Christian Kabore. November, 2020, Presiden Roch Marc Christian Kabore, terpilih kembali menjadi presiden. Tetapi, di

awal 2022 lalu, Presiden Roch Marc Christian Kabore di kudeta oleh militer, dan digantikan oleh Presiden Sementara, Paul-Henri Sandaogo Damiba (Schultes, I., 2022).

Percobaan kudeta atau konflik yang diakibatkan ketidakstabilan politik pemerintahan di Mali, terhitung dari tahun 2012-2021. Maret 2012, Presiden Amadou Toumani Toure dikudeta oleh militer dan di bulan April 2012, digantikan oleh Presiden sementara, dan di bulan Mei, upaya kudeta dilakukan untuk menggulingkan Presiden Amadou Toumani Toure. Agustus 2013, terjadi pemilihan presiden, dimana Ibrahim Boubacar Keita terpilih menjadi presiden kedua kalinya di tahun 2018. Pada Agustus, 2020 Presiden Ibrahim Boubacar Keita dikudeta dan digantikan oleh Presiden sementara, sebulan setelahnya, September 2020, Bah NDaw ditunjuk oleh kudeta pemimpin Assimi Goita sebagai Presiden Sementara sipil. dan pada Mei, 2021, Presiden Bah NDaw dikudeta oleh militer dan Presiden Assimi Goita dilantik sebagai presiden sementara (Schultes, I., 2022).

Dari data-data di atas menunjukkan bahwa ketidakstabilan politik yang berkelanjutan dialami oleh negara-negara tersebut. Cacatnya pemerintahan, membuat warga negara di masing-masing negara kudeta merasa tidak puas dengan demokrasi di negara mereka sendiri. sekitar 45% penduduk Burkinabe sama sekali tidak atau sangat tidak puas dengan demokrasi di negara mereka negara, warga yang tidak puas setinggi hampir 70% di Guinea dan lebih 75% di Mali. Hampir setengah dari Burkinabe dan sekitar 60% orang Mali dan Guinea berpikir bahwa pemilu tidak memungkinkan orang untuk menyingkirkan pemimpin yang sedang berkuasa, sehingga mereka mengambil jalur kudeta untuk menggulingkan pemimpin di negaranya. Tetapi dari tingkat kepuasan yang disajikan dalam jurnal tersebut, juga menunjukkan bahwa warga negara masing-masing negara tersebut belum puas dengan keadaan negara yang terus-menerus mengalami guncangan politik, ketidakstabilan politik di negaranya (Schultes, I., 2022).

Melihat data yang ada, dampak dari perubahan iklim dan juga ketidakstabilan politik dalam suatu negara, terkhusus Guinea, Burkina Faso, dan Mali terlihat sangat nyata dan sama-sama menjadi ancaman berkelanjutan di negara tersebut. Perubahan iklim sendiri dapat mengancam keamanan manusia seperti, merusak mata pencaharian, mengorbankan budaya dan identitas, terjadinya peningkatan migrasi (migrasi paksa), dan mengurangi kemampuan negara untuk dapat menyediakan kondisi yang diperlukan untuk keamanan manusia. Terlebih ditambah dengan ketidakstabilan politik yang terjadi di negara tersebut,

semakin menciptakan dan menambahkan kerentanan di negara tersebut. “Climate change acts as a “threat multiplier” in the region, because putting more pressure on limited resources and reinforcing pre-existing threat such and political instability” yang tertulis dalam artikel karya Emrah Sofuoglu dan Ahmet turut mendasari asumsi dan hipotesis awal penulis, dimana “Climate change is bigger threat than political instability”. Perubahan iklim dapat menjadi ancaman yang lebih jelas dan akan semakin sulit untuk dihindari oleh negara-negara yang mengalami permasalahan pemerintahan (ketidakstabilan politik, berupa kudeta).

Perubahan iklim akan sangat memperburuk standar hidup marginal di banyak negara kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Tetapi keadaan alam, dan atau bencana-bencana yang terjadi diakibatkan dari perubahan lingkungan ini tidak secara langsung mempengaruhi penyebab dari ketidakstabilan politik, namun sebaliknya keadaan politik dan pemerintahan yang tidak stabil, dapat secara langsung mempengaruhi dampak dari perubahan iklim, karena ketidakmampuan pemerintah meminimalisir dampak dan mengelola keadaan alam pasca bencana-bencana alam yang terjadi. Isu-isu seperti perubahan cuaca yang ekstrem dan ketidakstabilan politik inilah yang menciptakan masalah simultan di wilayah dan memicu ketegangan global. Kutipan dari artikel Emrah Sofuoglu dan Ahmet “climate change has the potential to create natural and human catastrophes far beyond what is seen today, and the consequences will bring social demands that exceed the capacity of governments to cope, and this situation will increase political instability”. Kembali menjadi penguat bahwa permasalahan iklim yang tidak ditangani dan diselesaikan dengan baik, akan menjadi efek domino, bagi permasalahan yang lainnya. Tetapi dari sinilah penulis melihat urgensi untuk menyelesaikan, dan atau meminimalisasikan ketidakstabilan politik di negara-negara tersebut agar kedepannya dapat lebih siap dan sigap dalam menghadapi perubahan iklim yang akan membawa dampak negatif bagi masyarakat, dan lingkungan.

Perubahan iklim tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga memicu berbagai masalah sosial. Kenaikan suhu, kekeringan, dan bencana alam akibat perubahan iklim mengancam ketersediaan air, pangan, dan energi, serta memicu konflik dan migrasi. Negara-negara di Afrika, yang kontribusinya terhadap perubahan iklim sangat kecil, justru menjadi korban paling parah. Perubahan iklim memperparah masalah yang sudah ada, seperti kemiskinan dan ketidakstabilan politik. Sehingga dikatakan bahwa perubahan iklim

adalah ancaman serius yang dapat memicu berbagai masalah kompleks. Penulis menyetujui bahwa perubahan iklim adalah "threat multiplier," sehingga pemerintah harus memperbaiki kondisi internal karena lebih mudah dikendalikan daripada mengendalikan alam.

Sebagaimana hakikatnya, perubahan iklim bersifat alamiah, kita hanya dapat memperlambat dampak dari perubahan iklim tersebut, mengantisipasi dan meminimalisir dampak negatif yang disebabkan. Lingkungan akan menjadi 'teman' ketika kita memanfaatkannya dengan baik, tetapi lingkungan dapat menjadi 'musuh' jika kita bertindak semena-mena dan mengeksploitasinya. Untuk itu diperlukan regulasi khusus mengenai lingkungan hidup, regulasi dan proyek-proyek pemerintah yang mempertimbangkan alam. Hal yang begitu menyayangkan, negara-negara di kawasan Afrika, bukan kontributor utama emisi global, dan bukan juga menjadi negara yang menyebabkan cepatnya perubahan iklim. Tetapi menjadi mereka yang akan mengalami dampak besar, dari adanya perubahan iklim ekstrem ini.

Afrika Barat saat ini menghadapi ancaman ganda yang saling terkait: ketidakstabilan politik dan perubahan iklim. Serangkaian kudeta telah mengguncang kawasan ini, mengalihkan perhatian dari krisis iklim yang semakin parah. Padahal, perubahan iklim justru merupakan ancaman yang jauh lebih besar dan berkelanjutan. Kegagalan kebijakan pemerintah dalam mengatasi ketidaksetaraan dan perubahan iklim telah memperparah konflik dan bencana kemanusiaan. Negara-negara di Afrika Barat perlu segera mengatasi masalah pemerintahan yang buruk untuk dapat menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin mendesak. Jika tidak, kawasan ini akan semakin rentan terhadap bencana alam, konflik, dan krisis kemanusiaan yang lebih besar lagi. Perubahan iklim tidak hanya mengancam stabilitas lingkungan, tetapi juga stabilitas politik dan sosial di Afrika Barat.

Permasalahan iklim yang sangat nyata ini tidak bisa diabaikan begitu saja, permasalahan kudeta atau ketidakstabilan politik dapat didorong bersama untuk segera menyudahi 'lingkaran setan kudeta' tersebut. Rentetan kudeta baru-baru ini menunjukkan krisis pemerintahan dan keamanan yang semakin memperparah dampak perubahan iklim, negara-negara tersebut tidak siap dan tidak dapat beradaptasi dengan perubahan iklim yang ada, dikarenakan terlalu sibuk membenahi pemerintah tanpa dasar yang jelas. Ketidakstabilan politik di Afrika Barat membuat negara-negara di kawasan ini rentan terhadap kekerasan dan krisis kemanusiaan yang diperburuk oleh perubahan iklim. Untuk

mengatasi tantangan ini, pemerintah-pemerintah di Afrika Barat perlu memperbaiki kebijakan dan kapasitas mereka.

Semakin banyak bukti yang menunjukkan bahwa perubahan iklim adalah ancaman serius bagi Afrika. Sayangnya, banyak negara di kawasan ini masih terjebak dalam ketidakstabilan politik yang menghambat upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Untuk menghadapi tantangan ini, sebagian besar negara Afrika Barat yang tidak mampu melakukan perubahan ini sendirian memerlukan bantuan dari kawasan atau bahkan global untuk dapat mengakhiri konflik kudeta, ketidakstabilan politik yang memperburuk kualitas negara tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan iklim adalah ancaman eksistensial bagi Afrika. Dampaknya yang meluas, mulai dari kekeringan hingga konflik, jauh melampaui ketidakstabilan politik. Negara-negara di Afrika, yang paling sedikit berkontribusi pada perubahan iklim, justru menanggung beban paling berat. Sebagai "pengganda ancaman," perubahan iklim memperburuk ketidakstabilan politik yang sudah ada dan menambah tekanan pada sumber daya yang terbatas. Di Afrika Barat, peningkatan suhu telah memicu kekeringan, degradasi lahan, kekurangan air, dan banjir, yang mengancam pertanian, sumber daya air, serta kesejahteraan masyarakat. Dampaknya meluas secara ekonomi, sosial, dan politik, menjadikan perubahan iklim ancaman yang lebih besar daripada ketidakstabilan politik. Kini saatnya mengakui ancaman yang lebih besar, nyata, dan tak terhindarkan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Hakeem Onapajo and Muhammad Dan Suleiman, "Why West Africa Has Had so Many Coups and How to Prevent More," *The Conversation*, February 15, 2022, <http://theconversation.com/why-west-africa-has-had-so-many-coups-and-how-to-prevent-more-176577>.
- Tim detikcom, "Benua Afrika : Letak Astronomis, Karakteristik, dan Negara di Dalamnya," *detikedu*, accessed July 2, 2023, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5676137/benua-afrika--letak-astronomis-karakteristik-dan-negara-di-dalamnya>.
- Mengapa 'Kudeta Begitu Populer' Di Kawasan Afrika Barat?," *IslamToday* (blog), February 9, 2022, <https://islamtoday.id/internasional/20220209123034-65051/mengapa-kudeta-begitu-populer-di-kawasan-afrika-barat/>.

- “Causes and Effects of Climate Change,” United Nations, accessed July 2, 2023, <https://www.un.org/en/climatechange/science/causes-effects-climate-change>.
- “Climate Change Is an Increasing Threat to Africa,” UNFCCC, accessed July 2, 2023, <https://unfccc.int/news/climate-change-is-an-increasing-threat-to-africa>.
- “What Is Climate Change?,” United Nations, accessed July 2, 2023, <https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change>.
- “How Africa Will Be Affected by Climate Change,” BBC News, December 15, 2019, sec. Africa, <https://www.bbc.com/news/world-africa-50726701>.
- Robertus Benny Dwi Koestanto, “Afrika dalam Bayang-bayang Kudeta, Pandemi, dan Perubahan Iklim,” Kompas.id, February 5, 2025, <https://www.kompas.id/baca/internasional/2022/02/05/persoalan-kudeta-dan-pandemi-covid-19-warnai-ktt-uni-afrika>
- Emrah Sofuoğlu and Ahmet Ay, “The Relationship between Climate Change and Political Instability: The Case of MENA Countries (1985:01–2016:12),” *Environmental Science and Pollution Research* 27 (April 1, 2020): 9, <https://doi.org/10.1007/s11356-020-07937-8>.
- Mouhamadou Bamba Sylla, Pinghouinde Michel Nikiema, Peter Gibba, Ibourahima Kebe, and Nana Ama Browne Klutse, “Climate Change over West Africa: Recent Trends and Future Projections,” *Adaptation to Climate Change And Variability In Rural West Africa* (2016): 25–40, https://doi.org/10.1007/978-3-319-31499-0_3.
- Sylla et al., “Climate Change over West Africa,” 35.
- Antony Ongayo, “Political Instability in Africa Where the Problem Lies and Alternative Perspectives,” (2008): 2, <https://doi.org/10.13140/2.1.2585.0241>.
- Kheira Tarif, “Climate Change and Violent Conflict in West Africa: Assessing the Evidence” (SIPRI, February 2022): 1, <https://www.sipri.org/publications/2022/sipri-insights-peace-and-security/climate-change-and-violent-conflict-west-africa-assessing-evidence>.
- Ines Schultes, “Western Africa’s Recent Coups : Highlight the Risk of Trading off Development for Security, the Rule of Law and Rights” (mo.ibrahim.foundation, April 2022): 2, <https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2022-04/western-africa-coups.pdf>.